

Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten purworejo

Woro Ayuda Murti¹, Betari Maharani^{2*}

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

*betari.maharani@ummgl.ac.id

DOI: 10.31603/bacr.11255

Abstract

This research aims to empirically test the influence of village apparatus competence, community participation, the use of information technology, internal control systems and accounting information systems on accountability in managing village funds in villages throughout Kemiri District, which consists of 40 villages. This research is quantitative research using survey technique. The data source in this study used primary data which was collected using a questionnaire using a purposive sampling method, so that the sample obtained was 78 respondents consisting of village heads, village secretaries and treasurers or financial officers. The results of this research show that the competency variable of village officials has a positive effect on the accountability of village fund management. Meanwhile, community participation, use of information technology, internal control systems and accounting information systems show results that do not affect the accountability of village fund management

Keywords: *village apparatus competence; community participation; information technology; accountability in managing village funds*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa diseluruh Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo yang terdiri dari 40 desa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik survei. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan menggunakan metode purposive sampling, sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 78 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan bendahara atau kaur keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: kompetensi aparatur desa; partisipasi masyarakat; teknologi informasi; akuntabilitas pengelolaan dana desa



1. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tahun 2014 berfokus pada peningkatan pembangunan nasional. Salah satu program pembangunan nasional adalah pembangunan desa melalui pemberian dana desa. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses pengelolaan dana desa dijelaskan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 yakni dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dana desa harus dikelola berdasarkan aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai pilar akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan dan mengungkapkan setiap aktivitas yang dilakukan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Penerapan tata pemerintahan yang baik dapat mempengaruhi terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui dana desa yang diterima untuk pembangunan dan pembinaan masyarakat desa. Pemberian dana desa yang dilakukan pemerintah pusat yang diambil dari APBN selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat pada Tabel 1 bahwa mulai tahun 2018-2022, jumlah pemberian dana desa terus meningkat.

Tabel 1. Tabel Dana desa dari tahun 2018-2022

Tahun	Besar Anggaran (dalam triliun)
2018	Rp 59,9
2019	Rp 69,8
2020	Rp 71,2
2021	Rp 72,0
2022	Rp 68,0

Sumber: kemenkeu.go.id

Pemanfaatan dana desa belum dilakukan dengan maksimal, masih terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan penyalahgunaan dana desa yang termasuk dalam bentuk korupsi dana desa. Fenomena ini terjadi di Kabupaten Purworejo yang ditandai dengan adanya beberapa penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa. Terdapat beberapa desa di empat kecamatan yang melakukan tindakan korupsi yang ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Purworejo

Tahun	Nama Kecamatan	Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian
2020	Kemiri	2	Rp. 1.039.859.456
2020			Rp. 24.000.000
2020	Loano	1	Rp. 607.700.000
2018	Ngombol	1	Rp. 97.000.000
2021	Purwodadi	1	Rp. 83.000.000

Sumber: data diolah, 2022

Tahun 2016 hingga 2018 terjadi korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa dan Plt Sekertaris Desa (sekdes) Desa Wonosari sebesar Rp1.039.859.456,00 yang terungkap pada 2020 (Heksantoro, 2020). Tahun 2015-2016 terjadi korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa dan Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD atau Bapedes) Desa Kroyo Lor yang baru terungkap pada awal tahun 2020 (Annizar, 2020). Dari kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kemiri masih rendah. Kasus tersebut terjadi karena motivasi aparatur desa untuk memperoleh keuntungan pribadi bukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Rendahnya akuntabilitas pengelolaan dana desa kemungkinan disebabkan kurangnya kompetensi aparatur dalam mengelola dana desa. Sementara, aparatur desa yang kompeten dinilai mampu mengelola dan mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pada akhir pelaksanaan kegiatan, aparatur yang kompeten mampu menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban serta mengungkapkan secara lengkap penggunaan dana desa. Hasil penelitian oleh Pahlawan et al. (2020), Polutu et al. (2022), Sujatnika & Sulindawati (2022) dan Zulkifl et al. (2021) bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian oleh Huda (2022) dan Indraswari & Rahayu (2021) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program pemerintah desa namun juga mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam memberikan pendapat dalam pengelolaan dana desa serta mengawasi setiap aktivitas yang menggunakan dana desa. Secara tidak langsung masyarakat berperan dalam meningkatkan kinerja pemerintah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Menurut Huda (2022), Pahlawan et al. (2020), Sujatnika & Sulindawati (2022), partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan menurut Indraswari & Rahayu (2021), partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah desa diharapkan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan desa. Dengan bantuan teknologi informasi, pemerintah desa dapat dengan mudah mengolah informasi, sehingga dapat membantu mencapai pengelolaan dana desa yang akuntabel. Menurut Indraswari & Rahayu (2021), Marlina et al. (2021) dan Pahlawan et al. (2020) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan Putra & Priono (2022) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor keempat yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan dalam suatu organisasi. Sistem pengendalian internal dapat terwujud apabila aparatur desa memiliki kompetensi yang memadai agar mampu melaksanakan tugas pemerintah desa dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat salah satunya adalah pengelolaan

keuangan yang baik dan benar. Menurut penelitian Huda (2022), Pahlawan et al. (2020), Polutu et al. (2022) dan Putra & Priono (2022) sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian Pahlawan et al. (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor terakhir yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu sistem informasi akuntansi. Ketiadaan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap ketidakstabilan pengelolaan dana desa. Sistem informasi akuntansi yang baik akan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ada di desa, terutama dalam membantu mengumpulkan, mencatat dan menyimpan informasi aktifitas keuangan yang menggunakan dana desa. Menurut penelitian Fadil (2020), Polutu et al. (2022), Putra & Priono (2022) dan Wahyuni et al. (2018), sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian Widiyanthi (2021) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Polutu et al. (2022), mengenai pengaruh kompetensi aparat desa, sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan semua variabel yang ada serta metode yang digunakan. Sedangkan perbedaannya yaitu, pertama penelitian ini menambahkan dua variabel yaitu partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi. Penambahan variabel partisipasi masyarakat karena masyarakat bisa disebut juga pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan kebijakan organisasi publik, terutama implementasi pembangunan di desa-desa (Pahlawan et al., 2020). Penambahan teknologi informasi karena selain sebagai teknologi komputer dan pemrosesan dan penyimpanan informasi, teknologi informasi juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Kedua, objek penelitian yang dilakukan yaitu di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, dilakukan penelitian karena pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kemiri masih kurang. Terungkap kasus penyalahgunaan dana desa di Kecamatan Kemiri menunjukkan bahwa pemberian dana desa dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori dan pengetahuan bidang akuntansi serta sumber informasi, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan faktor-faktor penentunya.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data primer. Pengumpulan data melalui kuesioner yang didistribusikan kepada aparat pemerintah desa di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 120 aparatur desa dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini melibatkan enam variabel yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen dan kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal serta sistem informasi

akuntansi sebagai variabel independen. Indikator dari masing-masing variabel disusun dalam [Tabel 3](#).

Tabel 3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban, melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media, pertanggung jawaban yang dikerjakan secara berkala Mardiasmo (2017).	<ul style="list-style-type: none"> • Kejujuran dan keterbukaan informasi • Kepatuhan dalam pelaporan • Kesesuaian prosedur • Kecukupan informasi • Ketepatan penyampaian laporan (Pahlawan et al., 2020)	Likert
Kompetensi Aparatur Desa	Kompetensi Aparatur Desa yaitu aparat desa yang memiliki potensi tinggi yang dapat berasal dari tingkat pendidikan yang ditempuh oleh aparat desa (Pahlawan, 2020).	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan pegawai mengenai pengelolaan dana desa • Pengetahuan pegawai mengenai penyusunan • Keahlian dalam menyusun dan menyajikan laporan dana desa • Pernah mengikuti pelatihan penatausahaan laporan keuangan dana desa (Pahlawan et al., 2020)	Likert
Partisipasi Masyarakat	Partisipasi adalah suatu prinsip dimana dalam setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal Kasmawati & Yuliani (Kasmawati & Yuliani, 2021).	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program desa • Mengusulkan rencana anggaran • Terlibat dalam rapat paripurna • Terlibat mengawasi dan melaporkan • Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran. (Pahlawan et al., 2020)	Likert
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan teknologi informasi menurut Rahmawati (2008) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Social • Affect (perasaan individu) • Kesesuaian tugas • Konsekuensi jangka panjang • Kondisi yang memfasilitas (Rahmawati, 2008)	Likert
Sistem Pengendalian Internal	Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan pengenalan • Penilaian risiko • Kegiatan pengendalian • Informasi dan komunikasi • Pemantauan pengendalian internal (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008)	Likert

keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP Nomor 60, 2008). [Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, 2008](#))

Sistem Informasi Akuntansi	Sistem informasi akuntansi adalah sistem pengumpulan catatan dan pemrosesan data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Romney (Romney & Steinbart, 2015).	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya manusia • Peralatan • Pengendalian internal dan keamanan data sistem • Prosedur • Data <p>(Maulinda, 2021)</p>	Likert
----------------------------	--	--	--------

Sumber: Beberapa penelitian terdahulu diolah, 2022

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan suatu data yang dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata dan nilai standar deviasi. Analisis regresi linear berganda merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016). Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda diformulasikan sebagai berikut.

$$APDD = \alpha + \beta 1KAD + \beta 2PM + \beta 3PTI + \beta 4SPI + \beta 5SIA + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

- APDD = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- α = nilai konstanta
- β = koefisien regresi
- KAD = Kompetensi Aparatur Desa
- PM = Partisipasi Masyarakat
- PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi
- SPI = Sistem Pengendalian Internal
- SIA = Sistem Informasi Akuntansi
- e = *error* (tingkat kesalahan)

3. Hasil dan pembahasan

3.1. Hasil

[Tabel 4](#) menunjukkan jumlah sampel yang dapat diolah pada penelitian ini adalah sebanyak 78 jawaban responden dengan presentase 75%.

Tabel 4. Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian

Uraian	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang diberikan	120	100%
Kuesioner yang tidak kembali	(12)	10%
Kuesioner yang kembali	108	90%
Jumlah kuesioner yang tidak lengkap	(30)	25%
Jumlah kuesioner yang diolah	78	75%

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh indikator pernyataan pada variabel yang digunakan valid dan reliabel. Sementara, hasil uji hipotesis ditunjukkan pada [Tabel 5](#).

Tabel 5. Hasil Uji t

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
KAD	3,426	1,666	0,001	H1 diterima
PM	-0,082	1,666	0,935	H2 tidak diterima
PTI	1,275	1,666	0,206	H3 tidak diterima
SPI	-0,285	1,666	0,776	H4 tidak diterima
SIA	0,996	1,666	0,322	H5 tidak diterima

3.2. Pembahasan

a. Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin meningkat kompetensi aparatur desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga semakin meningkat. Sikap profesional aparatur desa menjadikan pelaksanaan tugas dilakukan secara efektif dan efisien.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* yang menekankan pada motivasi para aparatur desa selaku pengelola dana desa (*steward*) untuk mementingkan tujuan organisasi dibandingkan tujuan individu atau kelompok. Pemerintah desa selaku pelayan masyarakat (*steward*) sudah semestinya melakukan pengelolaan dana desa sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat (*principla*).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh [Pahlawan et al. \(2020\)](#), [Polutu et al. \(2022\)](#), [Sujatnika & Sulindawati \(2022\)](#) dan [Zulkifl et al. \(2021\)](#) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [Indraswari & Rahayu \(2021\)](#) dan [Huda \(2022\)](#) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

b. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini diartikan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Masyarakat bertindak pasif dan kurang peduli terhadap aktivitas pemerintah desa yang menggunakan dana desa.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori *stewardship*, dimana masyarakat (*principla*) yang menjadi salah satu subjek penerima manfaat dana desa tidak ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaannya. Pengelolaan dana desa yang ditekankan untuk kepentingan dan tujuan bersama akan sulit tercapai. [Aprilya & Fitria \(2020\)](#) menjelaskan bahwa kurangnya interaksi aparatur desa dengan masyarakat menyebabkan masyarakat enggan atau kurang berpartisipasi dalam penyusunan atau pengelolaan anggaran dana desa.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Huda (2022), Pahlawan et al. (2020) dan Sujatnika & Sulindawati (2022) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indraswari & Rahayu (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

c. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa baik buruknya tingkat pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparatur desa dalam melaksanakan tugas belum menggunakan teknologi informasi dengan baik. Teknologi informasi yang tersedia sudah memadai namun keterampilan aparatur dalam mengoperasikan teknologi informasi masih kurang.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori *stewardship*, bahwa teknologi pengelolaan informasi yang tidak memadai dan keterampilan yang kurang mumpuni menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Teknologi informasi yang memadai diharapkan mampu menunjang kinerja aparatur desa (*steward*) untuk menciptakan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun jika aparatur kurang menguasai penggunaan teknologi informasi artinya aparatur tidak kompeten sehingga dalam penyusunan laporan pengelolaan dana desa menjadi terkendala.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Indraswari & Rahayu (2021), Marlina et al. (2021) dan Pahlawan et al. (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra & Priono (2022) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

d. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Kemiri.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa para pengelola dana desa (*steward*) harus memberikan tanggung jawab yang baik untuk melakukan pengendalian yang efektif. Dari hasil implementasi yang baik untuk sistem pengendalian internal yang efektif dapat menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas, namun dalam pemerintahan desa di Kecamatan Kemiri sistem pengendalian internal yang tinggi maupun rendah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Setiap pengeluaran dana di pemerintah desa selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas dan setiap transaksi memiliki bukti pendukung. Aparatur desa selalu menerapkan

perilaku dan norma yang baik dan struktur organisasi instansi telah menggambarkan dengan jelas mengenai tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari setiap kegiatan. Namun terdapat beberapa jawaban netral terhadap pernyataan sistem pengendalian internal terutama terkait penyediaan alat pendukung untuk berbagai transaksi dan penyajian laporan keuangan. Pemerintah desa juga mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintah dalam bentuk sistem aplikasi yang dapat menunjang pelaporan keuangan. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, pertama sistem pengendalian internal sudah ada namun belum tersosialisasikan dengan baik terhadap aparatur desa dan kedua, sistem pengendalian belum ada di pemerintah desa.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [Huda \(2022\)](#), [Polutu et al. \(2022\)](#), [Putra & Priono \(2022\)](#) dan [Wahyuni et al. \(2018\)](#) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini konsisten terhadap penelitian yang dilakukan oleh [Pahlawan et al. \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

e. Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa baik buruknya sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kemiri.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori *stewardship*, dimana pemerintah desa (*steward*) sebagai lembaga dapat dipercaya dan memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan mampu membuat laporan pertanggungjawaban keuangan. Aparatur desa tidak terbantu dengan adanya sistem informasi akuntansi terkomputerisasi yang dapat membantu pengelolaan transaksi keuangan secara terintegrasi. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran aparatur desa dalam memanfaatkan sistem informasi akuntansi yang disebabkan kurangnya pemahaman mengenai sistem informasi akuntansi dengan baik. Selain itu, aparatur desa juga belum mengikuti pelatihan terkait sistem informasi akuntansi terkomputerisasi.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [Fadil \(2020\)](#), [Polutu et al. \(2022\)](#), [Putra & Priono \(2022\)](#) dan [Wahyuni et al. \(2018\)](#) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini konsisten terhadap penelitian yang dilakukan oleh [Widiyanthi \(2021\)](#) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo yaitu sebanyak 40 desa dengan

sampel 78 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu jawaban responden tidak dapat diperoleh sesuai target penyebaran kuesioner, data diperoleh 90% dan yang dapat diolah sebesar 75% karena tidak memenuhi kriteria sampel dan hilangnya kuesioner. Selain itu, variabel independen pada penelitian ini hanya mampu menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 26,4%. Hal ini berarti masih terdapat variabel lain diluar penelitian yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dalam pengisian kuesioner, responden dapat didampingi untuk memastikan bahwa responden mengisi kuesioner secara lengkap. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain yang belum diteliti seperti variabel kepemimpinan kepala desa. Hal ini karena pada penelitian yang dilakukan oleh (Sujatnika & Sulindawati, 2022) menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa dapat memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kepemimpinan dalam suatu organisasi dapat menentukan keberhasilan ataupun kegagalan organisasi tersebut (Fathoni, 2015). Terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi kepemimpinan kepala desa, antara lain kemampuan dalam pengambilan keputusan, kemampuan dalam memberikan motivasi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengendalikan bawahan, tanggung jawab, serta kemampuan mengendalikan emosi (Sujatnika & Sulindawati, 2022).

Referensi

- Annizar, B. (2020). *Korupsi dana desa Kroyo Lor Purworejo, proyek ditangani langsung kades dan ketua BPD*. Jatengroday.Com. <https://jatengtoday.com/korupsi-dana-desa-kroyo-lor-purworejo-proyek-ditangani-langsung-kades-dan-ketua-bpd>
- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(3).
- Fadil, M. (2020). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Fathoni, M. (2015). *Gaya kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan fisik desa (Studi di Desa Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*. Brawijaya University.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*.
- Heksantoro, R. (2020). *Diduga Korupsi Dana Desa Rp 1 M, Kades-Plt Sekdes di Purworejo Ditangkap*. DetikNews.
- Huda, F. M. (2022). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa dan SPI dengan TI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. UPN Veteran Jawa Timur.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, partisipasi

- masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Kasmawati, A., & Yuliani, N. L. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dan faktor yang mempengaruhinya. *UMMagelang Conference Series*, 360–375.
- Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Marlina, E., Rahmayanti, S., & Futri, A. D. R. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim, Riau. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 89–100.
- Maulinda, R. (2021). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162–172.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (2008). <https://www.bpkp.go.id/>
- Permendagri No. 113 (2014).
- Polutu, A., Mattoasi, M., & Usman, U. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 89–101.
- PP Nomor 60 (2008).
- Putra, B. S. A., & Priono, H. (2022). Pengaruh sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 4825–4836.
- Rahmawati, D. (2008). Analisis Faktor Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 5(1).
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). Sistem informasi akuntansi. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Sujatnika, I. N. J., & Sulindawati, N. L. G. E. (2022). Pengaruh Sistem Pelaporan, Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(02), 378–388.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).
- Wahyuni, S., Indrawati, N., & Al Azhar, A. (2018). Pengaruh sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan kompetensi aparat terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa: studi empiris desa-desa di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ekonomi*, 26(3), 98–110.
- Widiyanthi, N. M. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Naskah Publikasi Program Studi Akuntansi*.
- Zulkifl, Z., Sandrayati, S., & Ariani, N. (2021). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem

pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan muara enim kabupaten muara enim. *JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi)*, 6(1), 26–38.
